

Model Kampung Patin dalam Pembangunan Perikanan Lokal: Potensi Pembelajaran Kebijakan bagi Asia Tenggara.

The Kampung Patin Model in Local Fisheries Development: Potential Policy Lessons for Southeast Asia

Ira Wulandari¹⁾, Dina Muthmainnah^{2,3)}, Nurwanti^{2,3)*}, Larassita Damayanti¹⁾

¹⁾ Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, Indonesia

²⁾ Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

³⁾ The Southeast Asian Fisheries Development Center/ Inland Fishery Resources Development and Management Department, Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

*Penulis korespondensi: nurwanti.dewangga@gmail.com

Received August 2026, Accepted August 2026, Published August 2026

ABSTRAK

Pengembangan budidaya perikanan darat berbasis masyarakat di Asia Tenggara memerlukan pembelajaran dari praktik lokal yang mampu mengintegrasikan aspek produksi, kelembagaan, rantai nilai, dan dukungan kebijakan. Namun, praktik tersebut perlu dikaji secara sistematis untuk mengidentifikasi prinsip yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks ekologis, sosial, kelembagaan, dan pasar di wilayah lain. Penelitian ini menilai Kampung Patin di Kabupaten Kampar, Indonesia, sebagai praktik budidaya perikanan darat dan rantai nilai berbasis masyarakat yang berpotensi menjadi bahan pembelajaran kebijakan di Asia Tenggara. Penelitian menggunakan studi kasus kualitatif melalui telaah purposif terhadap dokumen pemerintah, publikasi resmi, dan literatur akademik. Analisis dilakukan terhadap sembilan indikator, yaitu sumber daya dan komoditas, tata kelola kebijakan, kelembagaan masyarakat, integrasi rantai nilai, dukungan pemerintah, keberlanjutan ekonomi, partisipasi perempuan, potensi pembelajaran adaptif, dan keberlanjutan ekologis. Hasil menunjukkan kinerja kuat pada basis produksi, integrasi rantai nilai, dukungan kebijakan, dan kolaborasi multilevel. Kapasitas kelembagaan, ketahanan ekonomi, dan partisipasi perempuan belum merata; potensi pembelajaran adaptif berada pada kategori sedang, sedangkan keberlanjutan ekologis belum dapat dinilai karena keterbatasan data. Karena itu, Kampung Patin lebih tepat dipahami sebagai praktik lokal terdokumentasi daripada sebagai model yang dapat direplikasi secara langsung. Nilai regionalnya terletak pada prinsip yang dapat diadaptasi sesuai kondisi ekologi, kelembagaan, pasar, dan sosial di lokasi penerima.

Kata kunci: budidaya perikanan darat; rantai nilai; pembelajaran kebijakan; Asia Tenggara

ABSTRACT

The development of community-based inland aquaculture in Southeast Asia requires learning from local practices that successfully integrate production, institutional arrangements, value chains, and policy support. However, such practices need to be systematically assessed to identify principles that can be adapted to the ecological, social, institutional, and market contexts of other locations. This study assessed Kampung Patin in Kampar Regency, Indonesia, as a community-based inland aquaculture and value-chain practice with potential relevance for policy learning in Southeast Asia. A qualitative case-study design was applied through a purposive review of government documents, official publications, and academic literature. Nine indicators were examined: resources and commodities, policy governance, community institutions, value-chain integration, government support, economic sustainability, women's participation, adaptive learning potential, and ecological sustainability. The findings showed strong performance in production, value-chain integration, policy support, and multilevel collaboration. Institutional capacity, economic resilience, and women's participation remained uneven; adaptive learning potential was moderate, while ecological sustainability could not be assessed because case data were insufficient. Therefore, Kampung Patin is more appropriately understood as a documented local practice rather than as a model that can be directly replicated. Its regional value lay in principles that could be adapted to the ecological, institutional, market, and social conditions of recipient locations.

Keywords: inland aquaculture; value chain; policy learning; Southeast Asia

PENDAHULUAN

Perikanan skala kecil berperan penting bagi pendapatan, ketahanan pangan, dan jaring pengaman rumah tangga, meskipun bentuk usahanya sangat beragam (Allison & Ellis, 2001; Béné, 2003; Béné *et al.*, 2010; FAO, 2015). Di Asia Tenggara, keberlanjutannya dipengaruhi oleh tekanan sumber daya, kapasitas kelembagaan, dan kesesuaian pengelolaan dengan kondisi lokal (Pomeroy, 2012). Penelitian ini tidak menyamakan perikanan tangkap skala kecil dengan budidaya, tetapi menggunakan literatur tersebut untuk menilai penghidupan, kelembagaan, rantai nilai, gender, dan dukungan kebijakan pada usaha budidaya perikanan darat skala kecil.

Kampung Patin merupakan nama populer Desa Koto Mesjid di Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Istilah “Kampung Patin” juga digunakan untuk menggambarkan sentra atau kawasan pengembangan ikan patin di beberapa daerah lain di Indonesia. Namun, dalam penelitian ini, Kampung Patin yang dimaksud secara spesifik adalah Desa Koto Mesjid, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang dipilih sebagai studi kasus karena memiliki karakteristik pengembangan perikanan darat yang relatif terintegrasi, mulai dari pembenihan, budidaya ikan patin (*Pangasianodon hypophthalmus*), produksi pakan, pengolahan hasil, pemasaran, hingga wisata edukasi. Integrasi tersebut menunjukkan keterkaitan antara kegiatan produksi, kelembagaan masyarakat, rantai nilai, dan dukungan pemerintah dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis perikanan.

Pemilihan Desa Koto Mesjid sebagai studi kasus juga didasarkan pada tersedianya dokumentasi dan informasi mengenai perkembangan usaha perikanan darat di wilayah tersebut, termasuk dokumentasi yang dilakukan oleh *Southeast Asian Fisheries Development Center* (SEAFDEC) melalui *Inland Fishery Resources Development and Management Department* (IFRDMD) pada periode 2020–2022. Ketersediaan dokumentasi tersebut memungkinkan dilakukan penelusuran secara kualitatif terhadap praktik lokal, kelembagaan, integrasi rantai nilai, dan dukungan kebijakan yang berkembang di Kampung Patin. Dengan demikian, pemilihan lokasi bukan dimaksudkan untuk menyatakan bahwa Kampung Patin merupakan satu-satunya atau model terbaik pengembangan perikanan patin di Indonesia, tetapi sebagai kasus yang informatif untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip pembelajaran yang berpotensi diadaptasi dalam konteks pengembangan perikanan darat di Asia Tenggara.

Kegiatan ekonomi di Kampung Patin menghubungkan budidaya ikan patin (*Pangasianodon hypophthalmus*), pembenihan, produksi pakan, pengolahan pascapanen, pemasaran, dan wisata edukasi. Keterhubungan berbagai aktivitas tersebut menunjukkan bahwa Kampung Patin tidak hanya berkembang sebagai sentra produksi ikan patin, tetapi juga sebagai ekosistem ekonomi lokal yang

melibatkan berbagai pelaku dan tahapan dalam rantai nilai perikanan darat. Karakteristik tersebut menjadikan Kampung Patin relevan untuk dikaji sebagai praktik lokal yang memiliki potensi menghasilkan pembelajaran bagi pengembangan perikanan darat di wilayah lain.

Dalam konteks tersebut, *Southeast Asian Fisheries Development Center* (SEAFDEC) merupakan organisasi antarpemerintah regional di bidang perikanan, sedangkan *Inland Fishery Resources Development and Management Department* (IFRDMD) adalah departemen SEAFDEC yang berfokus pada pengembangan dan pengelolaan sumber daya perikanan darat. Keterlibatan SEAFDEC/IFRDMD memberikan konteks penting dalam penelitian ini karena praktik perikanan darat di Kampung Patin tidak hanya memiliki nilai pada tingkat lokal, tetapi juga telah menjadi bagian dari proses dokumentasi dan pertukaran pengetahuan pada tingkat regional. Dalam konteks Kampung Patin, SEAFDEC/IFRDMD telah mendokumentasikan usaha perikanan darat terintegrasi di lokasi tersebut pada 2020–2022 dan berpotensi menjembatani praktik lokal dengan pembelajaran regional (SEAFDEC, n.d.; Muthmainnah *et al.*, 2022). Perempuan terlibat terutama dalam kegiatan pengolahan dan pemasaran (Nurwanti *et al.*, 2025).

Meskipun demikian, keberadaan praktik yang telah terdokumentasi belum secara otomatis menunjukkan bahwa pengetahuan dan pengalaman Kampung Patin telah menghasilkan pembelajaran yang dapat dimanfaatkan oleh pihak lain atau memengaruhi pengembangan kebijakan di tingkat yang lebih luas. Kajian terdahulu membahas strategi usaha pengolahan (Zuliarni, 2017), pemberdayaan ekonomi (Faridzi & Mulyana, 2024), sejarah sentra pengolahan (Kurniawan *et al.*, 2022), kuliner berbasis ikan patin (Yanti *et al.*, 2020), dan pengelolaan desa wisata (Erina & Sulistyani, 2022; Syaiful *et al.*, 2024). Namun, kajian tersebut belum membedakan secara sistematis antara keberhasilan lokal, dokumentasi pengetahuan, diseminasi, pembelajaran oleh pihak lain, dan perubahan kebijakan regional.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: (1) bagaimana Kampung Patin berkontribusi terhadap pembangunan perikanan lokal; (2) apa kekuatan, keterbatasan, dan kesenjangan buktinya pada aspek sumber daya, tata kelola, kelembagaan, rantai nilai, ekonomi, gender, dan ekologi; serta (3) sejauh mana bukti terdokumentasi mengenai pengalaman Kampung Patin dapat menjadi dasar pembelajaran kebijakan regional. Tujuannya adalah menilai model lokal secara seimbang dan merumuskan prinsip yang dapat dipelajari tanpa mengklaim adanya adopsi kebijakan ASEAN yang belum terbukti.

Konsep *lesson drawing* menjelaskan bahwa pengalaman suatu tempat dapat menjadi rujukan melalui inspirasi, sintesis, atau adaptasi, bukan semata-mata penyalinan (Rose, 1991). Transfer kebijakan selalu dipengaruhi aktor, konteks, dan tingkat kesesuaian, sehingga keberhasilan di tempat

asal tidak menjamin hasil yang sama di lokasi penerima (Dolowitz & Marsh, 2000). Pembelajaran juga berbeda dari perubahan kebijakan; pengetahuan baru dapat diperoleh tanpa perubahan program atau regulasi (Moyson *et al.*, 2017). Karena itu, penelitian ini membedakan praktik lokal, dokumentasi, diseminasi, pembelajaran/adaptasi, dan perubahan kebijakan.

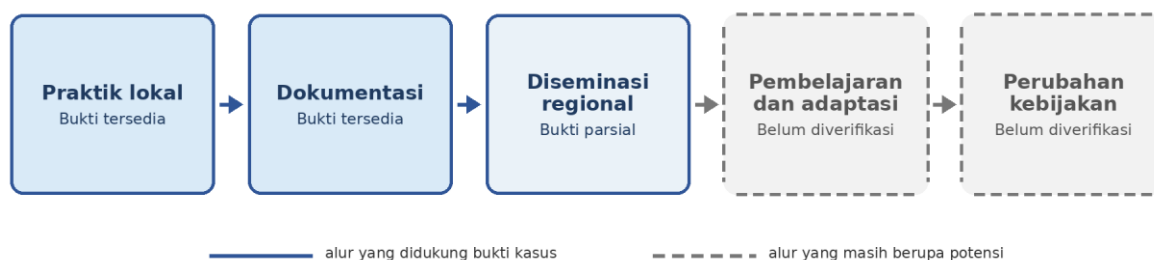
Dalam konteks regional, ASEAN *Blue Economy Framework* menempatkan pertukaran pengetahuan dan inovasi sebagai bagian dari pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan (ASEAN, 2023). Kerja sama yang fleksibel dan menghormati prioritas nasional lebih sesuai dengan karakter ASEAN Way (Acharya, 2001). SEAFDEC/IFRDMD diposisikan sebagai penghubung pengetahuan yang mempertemukan peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan melalui informasi dan saluran teknis nonhierarkis (Haas, 1992; Keohane, 1984; Keohane & Nye, 2012; SEAFDEC, n.d.). Efektivitas fungsi tersebut bergantung pada kredibilitas, relevansi, legitimasi, dan penggunaan informasi oleh penerima (Cash *et al.*, 2003; Cvitanovic *et al.*, 2015).

Penilaian kasus juga mempertimbangkan integrasi rantai nilai, inklusi gender, dan keberlanjutan

budidaya. Standar dan sertifikasi dapat membuka akses pasar, tetapi biaya kepatuhan dapat membatasi produsen kecil (Belton *et al.*, 2011; Bush *et al.*, 2013). Publikasi regional menunjukkan beragam peran perempuan dalam perikanan darat Indonesia (Muthmainnah *et al.*, 2022b; Nurwanti *et al.*, 2025), tetapi keterlibatan kerja belum otomatis menunjukkan kontrol atas pendapatan, aset, atau keputusan (Weeratunge *et al.*, 2010; Harper *et al.*, 2013; Kleiber *et al.*, 2015). Sementara itu, intensifikasi budidaya perlu dinilai terhadap kualitas air, limbah, penyakit, ketergantungan pakan, dan daya dukung kawasan (Edwards, 2015; Boyd *et al.*, 2020).

Berdasarkan kerangka tersebut, hubungan antara praktik lokal dan kemungkinan pembelajaran regional dirangkum pada Gambar 1. Garis penuh menunjukkan tahap yang didukung bukti kasus, sedangkan garis putus-putus menunjukkan tahap yang masih berupa potensi.

Kerangka pada Gambar 1 mencegah penyamaan antara praktik yang telah didokumentasikan dengan pembelajaran, adaptasi, atau perubahan kebijakan yang benar-benar terjadi.



Gambar 1. Jenjang transfer pengetahuan lokal ke regional dan status bukti dalam studi Kampung Patin
Sumber: Diolah penulis berdasarkan Rose (1991), Dolowitz dan Marsh (2000), Cash *et al.* (2003), serta Cvitanovic *et al.* (2015)

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada Januari–Juli 2026 melalui telaah dokumen yang diperoleh hingga Juli 2026. Lokasi kasus adalah Desa Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia, yang dikenal sebagai Kampung Patin. Analisis juga mencakup dokumen nasional dan regional Asia Tenggara yang relevan dengan pembelajaran kebijakan.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus untuk memahami hubungan antara praktik perikanan, kelembagaan, dan konteks kebijakan, bukan untuk menguji hubungan kausal secara statistik (Creswell & Poth, 2018; Yin, 2018). Unit analisisnya adalah model budidaya perikanan darat dan rantai nilai berbasis masyarakat di Desa Koto Mesjid.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kualitatif ini, populasi dipahami sebagai keseluruhan sumber informasi yang relevan, sedangkan sampel berupa dokumen yang dipilih secara purposif. Dokumen dipertahankan apabila: (1) membahas Kampung Patin atau budidaya ikan patin berbasis masyarakat; (2) memuat informasi tentang tata kelola, rantai nilai, kelembagaan, gender, keberlanjutan, atau pembelajaran kebijakan; (3) diterbitkan oleh jurnal ilmiah, SEAFDEC, pemerintah, atau lembaga yang dapat diidentifikasi; dan (4) memiliki tahun serta identitas penerbit yang jelas. Pemilihan dilakukan hingga informasi dinilai memadai untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Jenis dan Metode Pengumpulan Data

Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi dari artikel jurnal, publikasi SEAFDEC, laporan teknis, dokumen dan laman resmi pemerintah, serta berita kelembagaan. Penelusuran, seleksi, dan pencatatan dilakukan secara sistematis berdasarkan keterkaitan sumber dengan aspek budidaya, rantai

nilai, kelembagaan masyarakat, gender, keberlanjutan, dan pembelajaran kebijakan. Setiap temuan ditelusuri kembali ke sumber asal untuk menjaga keterlacakan data.

Analisis Data

Analisis isi kualitatif dilakukan dengan membaca, mengodekan, dan mengelompokkan informasi yang ditemukan dalam setiap dokumen ke dalam sembilan indikator, yaitu: (1) sumber daya dan komoditas; (2) tata kelola kebijakan; (3) kelembagaan masyarakat; (4) integrasi rantai nilai; (5) dukungan pemerintah; (6) keberlanjutan ekonomi; (7) partisipasi perempuan; (8) potensi pembelajaran adaptif; dan (9) keberlanjutan ekologis. Indikator disusun dari literatur penghidupan perikanan, rantai nilai, gender, dan keberlanjutan akuakultur, kemudian disesuaikan dengan karakter kasus (Allison & Ellis, 2001; Weeratunge *et al.*, 2010; Bush *et al.*, 2013; Boyd *et al.*, 2020).

Kategori kuat diberikan apabila sedikitnya dua jenis sumber menunjukkan fungsi yang berjalan tanpa kesenjangan utama. Kategori sedang-kuat menunjukkan fungsi telah berjalan tetapi masih terdapat kesenjangan kapasitas, kemandirian, pemerataan, atau ketahanan; kategori sedang menunjukkan kegiatan tersedia tetapi bukti hasil masih terbatas; kategori lemah digunakan jika fungsi belum memadai; dan belum dapat dinilai digunakan jika data kasus tidak mencukupi. Kategori tersebut merupakan penilaian interpretatif, bukan skor kuantitatif. (Patton, 2015).

Hasil penilaian selanjutnya dipetakan ke lima jenjang pada Gambar 1: praktik lokal, dokumentasi, diseminasi, pembelajaran/adaptasi, dan perubahan kebijakan. Publikasi atau kunjungan diklasifikasikan sebagai diseminasi; pembelajaran memerlukan bukti perubahan pemahaman penerima; sedangkan adaptasi dan perubahan kebijakan memerlukan perubahan program, prosedur, atau regulasi. Temuan ditriangulasikan antar-sumber. Keterbatasan penelitian meliputi tidak adanya wawancara dan pengukuran langsung, dan ketergantungan sebagian data pada sumber pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Model dan Integrasi Rantai Nilai

Kampung Patin berada di Desa Koto Mesjid, tempat budidaya ikan patin berkembang sebagai kegiatan ekonomi utama. Produksi ikan segar dilaporkan sekitar 12–20 ton per hari, dengan pemasaran ke beberapa provinsi di Sumatera (Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, 2025a). Sumber pemerintah daerah melaporkan kawasan perkolaman sekitar 150 hektare dengan 1.050 kolam (Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, 2025a; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2024). Data tersebut menunjukkan skala produksi yang penting bagi ekonomi lokal, tetapi istilah 'paling produktif' tidak digunakan karena tulisan ini tidak

membandingkan seluruh sentra budidaya di Sumatera.

Budidaya mulai berkembang lebih intensif sejak awal 2000-an. Peningkatan produksi mendorong pembangunan sentra pengolahan pada 2008 yang beroperasi lebih penuh pada 2012 (Kurniawan *et al.*, 2022). Sentra tersebut mempertemukan kelompok pengolah dan fasilitas bersama. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan produksi diikuti kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan ikan segar dan menahan nilai tambah di tingkat lokal.

Pada tahap hulu, sumber yang tersedia mencatat unit pakan mandiri, produksi benih, dan kolam pembesaran. Keberadaan produksi pakan lokal berpotensi menekan biaya, tetapi studi tidak memiliki data seri waktu tentang harga pakan, rasio konversi pakan, atau margin pembudidaya.

Pada tahap hilir, masyarakat mengembangkan ikan salai, abon, kerupuk kulit, bakso, nugget, dan filet. Sebagian produk dilaporkan dipasarkan ke Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, tetapi skala serta saluran perdagangannya belum dapat diverifikasi (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2024). Wisata edukasi memperluas fungsi kawasan sebagai tempat pembelajaran budidaya dan pengolahan (Erina & Sulistyani, 2022; Syaiful *et al.*, 2024). Temuan ini mendukung literatur yang menempatkan diversifikasi dan pengolahan sebagai strategi peningkatan nilai, tetapi akses standar dan pasar perlu disesuaikan dengan kapasitas produsen kecil (Belton *et al.*, 2011; Bush *et al.*, 2013).

Tata Kelola, Kelembagaan, dan Partisipasi Perempuan

Pemerintah Kabupaten Kampar menempatkan ikan patin sebagai komoditas unggulan dan memfasilitasi kelompok pembudidaya, bantuan, pendampingan, serta sertifikasi. Sertifikasi yang didorong mencakup Cara Budidaya Ikan yang Baik, Cara Pembenihan Ikan yang Baik, dan Cara Penanganan dan Pengolahan Ikan yang Baik (Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, 2025a). Lingkungan kebijakan tersebut memperkuat produksi dan mutu, tetapi manfaat sertifikasi perlu dinilai dari kepatuhan aktual, biaya, serta akses pasar, bukan hanya jumlah sertifikat.

Dukungan multilevel terlihat dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, mitra usaha, dan SEAFDEC/IFRDMD. Kampung Patin memperoleh pengakuan dalam program pendampingan desa wisata pada 2020 (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2024) dan diusulkan masuk Program 100 Kampung Nelayan Merah Putih (Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, 2025b). Dukungan eksternal memperluas sumber daya dan legitimasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai kemampuan kelompok untuk mempertahankan fungsi setelah program pendampingan berakhir.

Kelembagaan masyarakat berkembang melalui kelompok pembudidaya dan pengolah. Kelompok

tersebut menjadi sarana produksi, pembelajaran, dan akses program. Namun, publikasi yang ada belum menunjukkan pemerataan kemampuan manajerial, kualitas pencatatan usaha, regenerasi kepemimpinan, atau tingkat kemandirian kelompok (Faridzi & Mulyana, 2024; Kurniawan *et al.*, 2022). Karena itu, kelembagaan dinilai sedang-kuat, bukan kuat. Pada 2022, perempuan mencakup sekitar separuh dari 2.328 penduduk Desa Koto Mesjid. Sejumlah perempuan terlibat dalam persiapan bahan baku, sortasi, pembersihan, pembuatan filet, pengasapan, dan pemasaran digital (Nurwanti *et al.*, 2025). Kegiatan pengolahan dilaporkan menggunakan

sekitar 200–300 kilogram ikan per hari. (Nurwanti *et al.*, 2025).
Peran ini memperkuat pendapatan rumah tangga dan diversifikasi produk, sejalan dengan temuan bahwa pekerjaan perempuan sering terkonsentrasi pada tahap pascapanen dan perdagangan (Weeratunge *et al.*, 2010; Harper *et al.*, 2013). Namun, data mengenai upah, kontrol pendapatan, kepemilikan aset, akses pembiayaan, dan posisi pengambilan keputusan belum tersedia. Atas dasar itu, partisipasi perempuan dinilai sedang-kuat. Penilaian Model Kampung Patin dan Relevansinya bagi Pembelajaran Kebijakan Regional dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Model Kampung Patin dan Relevansinya bagi Pembelajaran Kebijakan Regional

Indikator	Penilaian	Bukti utama	Pelajaran regional
Sumber daya dan komoditas	Kuat	1.050 kolam/150 ha; produksi 12–20 ton/hari dilaporkan (Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, 2025a).	Pilih komoditas sesuai kondisi lokal.
Tata kelola kebijakan	Kuat	Komoditas unggulan; fasilitasi kelompok dan standar mutu (Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, 2025a).	Hubungkan mutu, kapasitas, dan pasar.
Kelembagaan masyarakat	Sedang-kuat	Kelompok budidaya/pengolahan dan sentra bersama; kapasitas manajerial belum terukur (Kurniawan <i>et al.</i> , 2022; Faridzi & Mulyana, 2024).	Perkuat kemandirian, pencatatan, kepemimpinan, dan regenerasi.
Integrasi rantai nilai	Kuat	Pakan, benih, budidaya, pengolahan, pasar, dan wisata (Muthmainnah <i>et al.</i> , 2022a; Zuliarni, 2017).	Adaptasi integrasi hulu–hilir, bukan komoditasnya.
Dukungan pemerintah	Kuat	Dukungan daerah, pusat, mitra, dan SEAFDEC/IFRDMD (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar, 2024).	Tetapkan pembagian peran dan strategi keluar.
Keberlanjutan ekonomi	Sedang-kuat	Diversifikasi produk/pasar; ketergantungan pada patin, pakan, dan pembiayaan masih berisiko (Muthmainnah <i>et al.</i> , 2022a).	Perkuat pembiayaan, diversifikasi, dan manajemen risiko.
Partisipasi perempuan	Sedang-kuat	Perempuan aktif dalam pengolahan/pemasaran; kontrol manfaat belum terukur (Nurwanti <i>et al.</i> , 2025).	Ukur keputusan, aset, pendapatan, dan kepemimpinan.
Potensi pembelajaran adaptif	Sedang	Publikasi dan kunjungan tersedia; bukti adaptasi kebijakan belum ada (Desa Koto Mesjid, 2022; Muthmainnah <i>et al.</i> , 2022a).	Lakukan penilaian kesiapan dan evaluasi hasil.
Keberlanjutan ekologis	Belum dapat dinilai	Data air, limbah, pakan, penyakit, dan daya dukung belum memadai.	Nilai ekologi sebelum perluasan atau adaptasi.

Sumber: Diolah penulis dari sumber yang tercantum pada setiap baris. Kategori merupakan penilaian kualitatif, bukan skor kuantitatif.

Penilaian Indikator dan Kesenjangan Bukti

Sebagaimana dirangkum pada Tabel 1, empat indikator dinilai kuat, tiga sedang-kuat, satu sedang, dan satu belum dapat dinilai. Hasil ini menunjukkan bahwa kekuatan produksi serta dukungan kelembagaan belum otomatis menjamin ketahanan ekonomi, pemerataan manfaat, kelayakan adaptasi, atau keberlanjutan ekologis.
Integrasi rantai nilai merupakan pelajaran paling kuat. Kampung Patin menunjukkan bahwa nilai ekonomi dapat dipertahankan di tingkat lokal ketika

pembenihan, pakan, pembesaran, pengolahan, pemasaran, dan edukasi tidak berjalan sendiri-sendiri. Namun, keterpaduan tersebut tidak boleh dibaca sebagai anjuran bagi negara lain untuk mengembangkan ikan patin. Prinsip yang dapat dialihkan adalah pemetaan rantai nilai dan penutupan mata rantai yang paling membatasi pendapatan pelaku lokal.
Keberlanjutan ekonomi masih menghadapi konsentrasi risiko pada satu komoditas. Perubahan harga pakan, penyakit ikan, akses pembiayaan, dan

fluktuasi pasar dapat memengaruhi pembudidaya serta pengolah secara bersamaan (Muthmainnah *et al.*, 2022a). Diversifikasi produk membantu, tetapi tidak sepenuhnya mengurangi risiko biologis dan biaya input. Penguatan pencatatan usaha, dana cadangan, akses asuransi, diversifikasi pasar, dan kapasitas kewirausahaan diperlukan sebelum model diperluas.

Keberlanjutan ekologis tidak dapat disimpulkan dari jumlah kolam, sertifikasi, atau volume produksi. Data kasus belum menjelaskan kualitas air masuk dan keluar, beban organik, penggunaan pakan, sumber benih, kejadian penyakit, pemakaian obat, pengelolaan limbah pengolahan, serta daya dukung kawasan. Literatur akuakultur menunjukkan bahwa indikator tersebut menentukan apakah pertumbuhan produksi dapat dipertahankan tanpa meningkatkan biaya lingkungan (Edwards, 2015; Boyd *et al.*, 2020). Oleh karena itu, klaim keberlanjutan tulisan ini dibatasi pada bukti sosial-ekonomi dan kelembagaan yang tersedia.

Dari Dokumentasi Lokal ke Pembelajaran Regional

Bukti yang paling kuat berada pada tiga tahap awal Gambar 1. Praktik lokal telah berkembang dan didokumentasikan dalam publikasi akademik, pemerintah, dan SEAFDEC/IFRDMD. Hasil kajian SEAFDEC/IFRDMD diterbitkan dalam majalah berorientasi kebijakan *Fish for the People*, sehingga tersedia bagi pembaca regional (Muthmainnah *et al.*, 2022a). Kunjungan tim Business Strategy Professional dari Malaysia menunjukkan adanya paparan lintasnegara terhadap produk olahan Kampung Patin (Desa Koto Mesjid, 2022). Bukti tersebut mendukung klaim diseminasi, tetapi belum membuktikan perubahan pemahaman atau kebijakan penerima.

SEAFDEC/IFRDMD dapat dipahami sebagai penghubung pengetahuan karena melakukan penelitian, dokumentasi, publikasi, dan interaksi teknis. Fungsi itu penting bagi kerja sama yang tidak mengikat, tetapi efektivitasnya perlu diukur dari penggunaan pengetahuan, bukan jumlah publikasi atau pertemuan. Indikator berikutnya dapat mencakup permintaan informasi dari negara anggota, penilaian kesiapan lokasi, perubahan rancangan program, uji coba prinsip, dan hasil yang diukur setelah adaptasi.

Empat prinsip memiliki potensi untuk dipelajari. Pertama, integrasi rantai nilai perlu dimulai dari hambatan lokal, bukan dari pilihan komoditas yang sudah ditentukan. Kedua, kolaborasi pemerintah–masyarakat–pasar harus disertai pembagian peran dan strategi keluar agar kelompok tidak bergantung pada bantuan. Ketiga, partisipasi perempuan harus diukur melalui akses terhadap manfaat dan keputusan, bukan hanya jumlah pekerja. Keempat, ekspansi produksi harus didahului penilaian daya dukung, biosekuriti, limbah, dan risiko pasar.

Replikasi adaptif karena itu memerlukan tahap scoping sebelum investasi. Negara atau lokasi penerima perlu menilai kesesuaian ekologi,

komoditas, kapasitas organisasi, permintaan pasar, akses input, peran perempuan, serta dukungan kebijakan. Hanya prinsip yang sesuai yang diuji dalam skala terbatas. Pendekatan ini konsisten dengan penarikan pelajaran yang menekankan adaptasi, bukan penyalinan (Rose, 1991; Dolowitz & Marsh, 2000).

Implikasi Kebijakan bagi SEAFDEC dan Negara Anggota

Pertama, SEAFDEC/IFRDMD dapat mengembangkan format dokumentasi kasus yang seragam. Setiap kasus perlu memuat masalah, konteks ekologi, aktor, rantai nilai, biaya, distribusi manfaat, gender, risiko, dan hasil. Format yang seragam memungkinkan perbandingan tanpa menghapus perbedaan nasional.

Kedua, pertukaran pengetahuan perlu menggunakan gerbang keputusan. Setelah tahap pengenalan, negara anggota melakukan penilaian kesiapan. Hasilnya dapat berupa melanjutkan uji coba, menyesuaikan prinsip, atau menunda penerapan. Mekanisme tersebut menghindari asumsi bahwa kunjungan studi otomatis menghasilkan replikasi.

Ketiga, uji coba perlu memiliki indikator hasil sejak awal. Indikator minimum mencakup biaya produksi, margin pelaku, stabilitas pasokan, kapasitas kelompok, akses perempuan terhadap keputusan dan pendapatan, mutu produk, kualitas air, beban limbah, penyakit, dan keberlanjutan pembiayaan. Data sebelum dan sesudah intervensi diperlukan agar pembelajaran regional menghasilkan bukti yang dapat digunakan.

Keempat, peran SEAFDEC/IFRDMD sebaiknya tetap sebagai fasilitator. Negara anggota menentukan prioritas komoditas dan kebijakan sesuai konteksnya, sedangkan SEAFDEC/IFRDMD membantu dokumentasi, pertukaran ahli, rancangan indikator, dan evaluasi lintasnegara. Posisi ini selaras dengan kerja sama institusional yang menyediakan informasi tanpa menghilangkan kewenangan nasional (Keohane, 1984; ASEAN, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap sembilan indikator, Kampung Patin menunjukkan praktik pembangunan perikanan lokal yang mengintegrasikan budidaya ikan patin dengan pembenihan, penyediaan pakan, pengolahan, pemasaran, dan wisata edukasi, serta didukung oleh tata kelola kebijakan dan kolaborasi multilevel. Kekuatan utama terdapat pada basis sumber daya dan produksi, integrasi rantai nilai, dukungan kebijakan, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Namun, kapasitas kelembagaan, ketahanan ekonomi, dan partisipasi perempuan belum merata, sementara bukti mengenai kapasitas manajerial kelompok, pencatatan usaha, regenerasi kepemimpinan, kemandirian kelembagaan,

pembelajaran adaptif, serta keberlanjutan ekologis masih terbatas. Dengan demikian, kontribusi Kampung Patin terhadap pembangunan perikanan lokal terutama terlihat pada terbentuknya ekosistem usaha berbasis komoditas lokal yang menghubungkan produksi, pengolahan, pemasaran, dan dukungan kelembagaan, tetapi belum seluruh aspek keberlanjutannya dapat dibuktikan secara memadai.

Pada tingkat regional, bukti yang terdokumentasi menunjukkan bahwa Kampung Patin dapat menjadi sumber pembelajaran kebijakan melalui prinsip pengembangan komoditas berbasis potensi lokal, keterhubungan produksi dengan pengolahan dan pemasaran, penguatan kelembagaan masyarakat, kolaborasi multilevel, dan dukungan kebijakan yang berkelanjutan. Namun, bukti tersebut masih berada pada tingkat praktik lokal terdokumentasi dan belum menunjukkan replikasi lintas negara, adaptasi pada konteks yang berbeda, dampak jangka panjang, atau pengaruh terhadap kebijakan formal ASEAN. Oleh karena itu, Kampung Patin belum dapat diposisikan sebagai model regional yang tervalidasi, melainkan sebagai kasus lokal yang menyediakan prinsip dan pengalaman untuk pembelajaran kebijakan yang perlu diseleksi, diadaptasi, dan diuji sesuai kondisi ekologis, sosial, kelembagaan, dan pasar di lokasi penerima. Penguatan bukti melalui dokumentasi terstandar, studi komparatif, pertukaran pembelajaran lintas negara, uji coba terbatas, serta pengukuran aspek ekonomi, kelembagaan, gender, dan ekologis diperlukan untuk menilai sejauh mana prinsip tersebut dapat diterapkan dan memberikan hasil pada konteks lain di Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. 2001. Constructing a Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order. Routledge.
- Allison, E. H., and Ellis, F. 2001. The Livelihoods Approach and Management of Small-Scale Fisheries. *Marine Policy*, 25(5), 377–388. [https://doi.org/10.1016/S0308-597X\(01\)00023-9](https://doi.org/10.1016/S0308-597X(01)00023-9)
- ASEAN. 2023. ASEAN Blue Economy Framework. ASEAN Secretariat. <https://asean.org/wp-content/uploads/2023/09/ASEAN-Blue-Economy-Framework.pdf>
- Béné, C. 2003. When Fishery Rhymes with Poverty: A First Step Beyond the Old Paradigm on Poverty in Small-Scale Fisheries. *World Development*, 31(6), 949–975. [https://doi.org/10.1016/S0308-750X\(03\)00045-7](https://doi.org/10.1016/S0308-750X(03)00045-7)
- Béné, C., Hersoug, B., and Allison, E. H. 2010. Not by Rent Alone: Analysing the Pro-Poor Functions of Small-Scale Fisheries in Developing Countries. *Development Policy Review*, 28(3), 325–358. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7679.2010.00486.x>
- Belton, B., Haque, M. M., Little, D. C., and Sinh, L. X. 2011. Certifying Catfish in Vietnam and Bangladesh: Who Will Make the Grade and Will it Matter? *Food Policy*, 36(2), 289–299. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2010.11.027>
- Boyd, C. E., D'Abramo, L. R., Glencross, B. D., Huyben, D. C., Juarez, L. M., Lockwood, G. S., McNevin, A. A., Tacon, A. G. J., Teletchea, F., Tomasso, J. R., Jr., Tucker, C. S., and Valenti, W. C. 2020. Achieving Sustainable Aquaculture: Historical and Current Perspectives and Future Needs and Challenges. *Journal of the World Aquaculture Society*, 51(3), 578–633. <https://doi.org/10.1111/jwas.12714>
- Bush, S. R., Belton, B., Hall, D., Vandergeest, P., Murray, F. J., Ponte, S., Oosterveer, P. J. M., Islam, M. S., Mol, A. P. J., Hatanaka, M., Kruijssen, F., Ha, T. T. T., Little, D. C., and Kusumawati, R. 2013. Certify Sustainable Aquaculture? *Science*, 341(6150), 1067–1068. <https://doi.org/10.1126/science.1237314>
- Cash, D. W., Clark, W. C., Alcock, F., Dickson, N. M., Eckley, N., Guston, D. H., Jäger, J., and Mitchell, R. B. 2003. Knowledge Systems for Sustainable Development. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100(14), 8086–8091. <https://doi.org/10.1073/pnas.1231332100>
- Creswell, J. W., and Poth, C. N. 2018. Qualitative inquiry and research design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). SAGE Publications.
- Cvitanovic, C., Hobday, A. J., van Kerkhoff, L., Wilson, S. K., Dobbs, K., and Marshall, N. A. 2015. Improving Knowledge Exchange Among Scientists and Decision-Makers to Facilitate the Adaptive Governance of Marine Resources: A review of knowledge and research needs. *Ocean & Coastal Management*, 112, 25–35. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2015.05.002>
- Desa Koto Mesjid. 2022. Tim Business Strategy Profesional (BSP) Malaysia Tinjau Produk Olahan Ikan Patin Desa Koto Mesjid. <https://kotomesjid.com/publikasi/berita/tim-business-strategy-profesional-bsp-malaysia-tinjau-produk-olahan-ikan-patin-desa-koto-mesjid>
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. 2024. Desa Wisata Kampung Patin. <https://disparbud.kamparkab.go.id/pages/desa-wisata-kampung-patin>
- Dinas Perikanan Kabupaten Kampar. 2025a. Ikan Patin: Komoditi Unggulan yang Mengangkat Perekonomian Kabupaten Kampar. <https://diskan.kamparkab.go.id/artikel-detail/56/ikan-patin-komoditi-unggulan-yang-mengangkat-perekonomian-kabupaten-kampar>

- Dinas Perikanan Kabupaten Kampar. 2025b. Kabupaten Kampar Usulkan Desa Koto Mesjid Masuk Program 100 Kampung Nelayan Merah Putih KKP. <https://diskan.kamparkab.go.id/artikel-detail/36/kabupaten-kampar-usulkan-desa-koto-mesjid-masuk-program-100-kampung-nelayan-merah-putih-kkp>
- Dolowitz, D. P., and Marsh, D. 2000. Learning From Abroad: the Role of Policy Transfer in Contemporary policy-making. *Governance*, 13(1), 5–23. <https://doi.org/10.1111/0952-1895.00121>
- Edwards, P. 2015. Aquaculture Environment Interactions: Past, Present and Likely Future Trends. *Aquaculture*, 447, 2–14. <https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2015.02.001>
- Erina, S., dan Sulistyani, A. 2022. Pengelolaan Desa Wisata Kampung Patin Koto Mesjid, Kabupaten Kampar. *JOM FISIP Universitas Riau*, 9(2).
- FAO. 2015. Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication. <https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/i4356en>
- Faridzi, M. A., dan Mulyana, M. 2024. Pemberdayaan Petani Ikan Patin untuk Meningkatkan Pendapatan Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 14(2).
- Haas, P. M. 1992. Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination. *International Organization*, 46(1), 1–35.
- Harper, S., Zeller, D., Hauzer, M., Pauly, D., dan Sumaila, U. R. 2013. Women and Fisheries: Contribution to Food Security and Local Economies. *Marine Policy*, 39, 56–63. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2012.10.018>
- Keohane, R. O. 1984. *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Keohane, R. O., and Nye, J. S. 2012. *Power and Interdependence* (4th ed.). Longman.
- Kleiber, D., Harris, L. M., and Vincent, A. C. J. 2015. Gender and Small-Scale Fisheries: a Case for Counting Women and Beyond. *Fish and Fisheries*, 16(4), 547–562. <https://doi.org/10.1111/faf.12075>
- Kurniawan, R. D., Isjoni, I., dan Asril, A. 2022. Sejarah Perkembangan Sentra Pengolahan Ikan Patin di Desa Koto Mesjid Kabupaten Kampar (2012–2019). *Jurnal Pattingalloang*, 9(1).
- Moyson, S., Scholten, P., and Weible, C. M. 2017. Policy Learning and Policy Change: Theorizing Their Relations from Different Perspectives. *Policy and Society*, 36(2), 161–177.
- <https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1331879>
- Muthmainnah, D., Fahmi, Z., Supriyadi, F., Rais, A. H., Sawestri, S., and Prianto, E. 2022a. Learning the Lessons from the Integrated Small-Scale Inland Fisheries Business in Kampong Patin Village, Indonesia. *Fish for the People*, 20(3), 39–42.
- Muthmainnah, D., Suryati, N. K., Fahmi, Z., and Nurwanti. 2022b. Understanding Gender Roles in Anguillid Eel Fisheries of Indonesia. *Fish for the People*, 20(2), 33–38.
- Nurwanti, Muthmainnah, D., Suryati, N. K., Supriyadi, F., Soesmono, A., and Shimoda, T. 2025. Fostering Women's Contributions to Inland Fisheries in Southeast Asia. *Fish for the People*, 23(1).
- Patton 2015. *Qualitative Research & Evaluation Methods*.
- Pomeroy, R. S. 2012. Managing Overcapacity in Small-Scale Fisheries in Southeast Asia. *Marine Policy*, 36(2), 520–527. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2011.10.002>
- Rose, R. 1991. What is Lesson-Drawing? *Journal of Public Policy*, 11(1), 3–30.
- SEAFDEC. (n.d.). Overview. *Southeast Asian Fisheries Development Center*. <https://www.seafdec.org/about/>
- Syaiful, S., Hasibuan, I. F., dan Risadi, Y. 2024. Potensi Desa Wisata Kampung Patin Desa Koto Mesjid dalam Pengembangan wisata Edukasi di Kabupaten Kampar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(6), 6013–6020.
- Weeratunge, N., Snyder, K. A., and Sze, C. P. 2010. Gleaner, Fisher, Trader, Processor: Understanding Gendered Employment in Fisheries and Aquaculture. *Fish and Fisheries*, 11(4), 405–420. <https://doi.org/10.1111/j.1467-2979.2010.00368.x>
- Yanti, D., Sumiarsih, E., dan Maryantina. 2020. Pemberdayaan Masyarakat dengan Usaha Kuliner Ikan Patin Kampung Patin Desa Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar. *Community Development Journal*, 1(2), 171–175.
- Yin, R. K. 2018. *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.
- Zuliarni, S. 2017. Analisis Strategi Pengembangan Usaha Pengolahan Ikan pada Kampung Patin, Kampar, Riau. *Journal of Applied Business Administration*, 1(1)